

Mengapa Duterte Ditangkap ICC tapi Netanyahu Masih Bebas?

Category: Internasional, News

written by Redaksi | 12/03/2025



ORINews.id – Polisi di Filipina menangkap Rodrigo Duterte, mantan presiden negara itu, pada hari Selasa atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan berdasarkan surat perintah Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Penangkapan terhadapnya dilakukan sementara sejumlah buron ICC seperti Perdana Menteri [Israel](#) Benjamin Netanyahu masih bebas melenggang.

Saat menjabat, Duterte mendorong polisi untuk memburu dan membunuh orang-orang yang mereka curigai terlibat dalam perdagangan obat-obatan terlarang. Kelompok hak asasi manusia mengatakan lebih dari 30.000 orang terbunuh dalam eksekusi di luar hukum.

The New York Times menganalisis, penangkapan ini merupakan kemenangan signifikan bagi ICC, sebuah badan peradilan independen yang menyelidiki dan mengadili orang-orang yang dituduh melakukan genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan agresi dari basisnya di Den Haag.

Namun penangkapan Duterte juga menunjukkan keterbatasan kekuasaan pengadilan: Meskipun yurisdiksinya luas, pengadilan tidak dapat melakukan penangkapan sendiri. Mereka bergantung

pada kerja sama pemerintah nasional untuk melaksanakan perintahnya, sehingga mereka bergantung pada Politik dalam negeri.

Penangkapan Duterte dimungkinkan karena ia tidak lagi menjabat dan lemah secara politik. Sebaliknya, kemungkinannya kecil bahwa penangkapan serupa dilakukan terhadap buron ICC lainnya yakni Presiden Vladimir Putin dari Rusia atau Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dari Israel akan dilakukan dalam waktu dekat.

Di atas kertas, ICC mempunyai kemampuan untuk memerintahkan penangkapan siapa pun yang dituduh melakukan kejahatan yang tercantum dalam Statuta Roma. Perjanjian tahun 1998 itu membentuk pengadilan, dan yang merupakan warga negara I.C.C. negara anggota atau melakukan kejahatan di wilayah salah satunya.

Bahkan para pemimpin yang menjabat pun tidak kebal dari penuntutan – suatu penyimpangan yang signifikan dari aturan hukum internasional yang lazim. Duterte menarik Filipina dari pengadilan pada masa kepemimpinannya, namun panel hakim ICC berpendapat bahwa pengadilan tersebut masih memiliki yurisdiksi karena dugaan kejahatannya terjadi sebelum penarikan diri tersebut. Namun dalam praktiknya, pengadilan tidak mempunyai kemampuan untuk mengejar para pemimpin, atau orang-orang yang berada di bawah perlindungan mereka.

Duterte mungkin berharap untuk dilindungi oleh penggantinya, Ferdinand Marcos Jr, yang pada awalnya berjanji untuk membentenginya dari penyelidikan internasional. Namun kemudian keluarga Duterte – terutama putrinya Sara Duterte, yang merupakan wakil presiden – berselisih secara dramatis dengan Marcos. Sara Duterte mengatakan dia ingin memenggal kepala Tuan Marcos dan mengancam akan menggali jenazah ayahnya yang sudah meninggal dan membuangnya ke laut.

Ketika hubungan memburuk, perlindungan Duterte dari pengadilan

internasional juga runtuh. Marcos mulai mengizinkan penyelidik ICC ke negara tersebut. Para ahli mengatakan keadaan ini menciptakan jalan sempit bagi ICC untuk bertindak.

“Kita tidak bisa mengharapkan sebuah institusi baru untuk secara substansial melawan operasi kekuasaan, atau kepentingan nyata dari aktor-aktor berkuasa,” kata Kate Cronin-Furman, seorang profesor di University College London yang mempelajari akuntabilitas atas kekejaman massal. “Tetapi kami berharap mereka akan melakukan penyesuaian terhadap hal-hal yang ada, dan seiring berjalannya waktu, hal-hal tersebut akan mengarah pada dunia yang lebih adil.” “Dengan tidak adanya ICC, Duterte mungkin menjalani hidupnya dengan bahagia, bertanggung jawab atas pembantaian ribuan orang,” tambahnya.

Sebagian besar surat perintah penangkapan ICC tidak berjalan dengan cara yang sama. Banyak dari surat perintah pengadilan yang paling penting belum menghasilkan penangkapan, termasuk dalam kasus Putin dan Netanyahu. Bagi para pemimpin politik yang menjadi sasaran ICC, kekuasaan kantor mereka sering kali cukup untuk melindungi mereka dari penangkapan. Namun dengan contoh Duterte, dinamika tersebut menciptakan insentif tambahan bagi mereka untuk tetap menjabat selama mungkin.[]